ISSN: 2985-7236 (P); 2985-7244(e)

AE INNOVATION
AGRICULTURAL ENGINEERING INNOVATION JOURNAL

AE Innovation Vol. 4, No. 02, July 2026
https://jurnal.instiperjogja.ac.id/index.php/AEI
Page 85-92
Article history:
Submitted: March 7th, 2025
Accepted : November 20th, 2026
DOI: 10.55180/aei.v4i2.2396

Analisa Keberlanjutan Perkebunan Rakyat dalam Mendukung Indonesia *Sustainable Palm Oil* di Kecematan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

Irawan Abidin*), Hermantoro, Sushardi
Program Studi Magister Managemen Perkebunan, Fakultas Magister Managemen Perkebunan, Institut Pertanian STIPER Yogyakarta
Jl. Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55282
*)E-mail penulis : irawanabidin41@gmail.com

ABSTRACT

The oil palm plantation sector is a strategic component of Indonesia's economy, including smallholder plantations that continue to expand and are projected to account for up to 60% of the national planted area. However, the expansion of smallholder plantations has raised concerns regarding environmental sustainability. To ensure sustainable cultivation practices, the government mandates the implementation ISPO *for all growers through Presidential Regulation No. 44/2020. This study aims to assess the realization of ISPO principles and criteria among smallholder oil palm plantations in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency, and to identify the challenges faced by independent smallholders. The research was conducted in March 2024 using a descriptive method, employing a Guttman scale questionnaire (Yes/No responses) administered to 100 farmer respondents. Data were analyzed using tabulation, scoring, and quantitative descriptive presentation based on the ISPO principles and criteria. The results show that the majority of farmers are within productive age (76%), although their education level is relatively low, dominated by elementary school graduates (30%). The implementation of ISPO principles remains low, particularly in aspects of legality, farmer institutionalization, the availability of STD-B and SPPL documents, and operational reporting. Most farmers are not members of farmer groups or cooperatives, road access to collection points is inadequate, and environmental licensing documents are largely unavailable. However, spatial conformity and land ownership requirements have been met. Overall, ISPO compliance levels among smallholders in Pelepat Ilir Subdistrict remain low and require government intervention and intensive assistance, particularly in fulfilling legal documentation, strengthening farmer institutions, and improving understanding of sustainable plantation practices.*

Keywords: ISPO; *Independent Smallholders; Oil Palm Plantations,* Pelepat Ilir; *Sustainability*.

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk bagi perkebunan rakyat yang terus berkembang dan berpotensi mendominasi hingga 60% total areal nasional. Namun, perluasan kebun rakyat juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk menjamin praktik budidaya berkelanjutan, pemerintah mewajibkan penerapan sertifikasi ISPO bagi semua kebun melalui

Perpres 44/2020. Kajian ini diproyeksikan untuk mengevaluasi secara mendalam sejauh mana penerapan regulasi keberlanjutan ISPO dalam tata kelola perkebunan rakyat di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pekebun swadaya. Penelitian dilaksanakan pada Maret 2024 menggunakan metode deskriptif dengan instrumen kuesioner skala Guttman (jawaban Ya/Tidak) yang diberikan kepada 100 responden petani. Data dianalisis menggunakan tabulasi, perhitungan skor, dan penyajian deskriptif kuantitatif sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Sebanyak 76% petani responden diketahui masih berada dalam usia produktif, namun tingkat pendidikan relatif rendah, didominasi lulusan SD (30%). Realisasi penerapan prinsip ISPO masih rendah pada aspek legalitas, kelembagaan pekebun, keberadaan STD-B, SPPL, serta pelaporan operasional. Mayoritas petani diketahui masih belum terafiliasibaik koperasi ataupun kelompok tani, akses jalan menuju TPK kurang memadai, dan dokumen perizinan lingkungan hampir tidak dimiliki. Namun, aspek kesesuaian tata ruang dan kepemilikan lahan sudah terpenuhi. Secara keseluruhan, tingkat ketercapaian ISPO di Kecamatan Pelepat Ilir masih rendah dan memerlukan intervensi pemerintah serta pendampingan intensif, terutama dalam pemenuhan dokumen legalitas, penguatan kelembagaan pekebun, dan peningkatan pemahaman tentang praktik perkebunan berkelanjutan.

Kata Kunci: ISPO; Pekebun Swadaya; Perkebunan Kelapa Sawit; Pelepat Ilir.

PENDAHULUAN

Menduduki posisi krusial dalam struktur perekonomian nasional berkat kapasitasnya sebagai sumber utama CPO dan PKO. Kedua turunan minyak tersebut merupakan komponen esensial bagi pemenuhan bahan baku di berbagai sektor industri, baik pada kategori pangan maupun non-pangan. Kontribusi strategis ini menjadikan komoditas tersebut sebagai pilar utama dalam mendukung stabilitas industri manufaktur serta pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan.

Selama beberapa dekade terakhir, kelapa sawit telah mengukuhkan posisinya sebagai komoditas unggulan nasional. Dinamika industri ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama pada periode tahun 2021, Kementan mendata, luas mencapai 15,08 juta hektar (ha). Sektor perkebunan rakyat di Indonesia mencakup area seluas 6,08 juta hektar, yang merepresentasikan 40,34% dari total luasan lahan nasional. Jika dikomparasikan dengan komoditas strategis lainnya seperti karet dan kopi, kontribusi luas sawit rakyat memiliki posisi yang sangat kompetitif berdampingan dengan pengusahaan oleh sektor swasta maupun negara.

Ekspansi besaran area perkebunan diproyeksikan mendominasi struktur pengusahaan kelapa sawit di Indonesia hingga mencapai pangsa sebesar 60%. Meskipun kontribusi sektor swadaya ini sangat signifikan terhadap pembangunan nasional, pesatnya peningkatan luasan tersebut memicu kekhawatiran terhadap pengabaian aspek keberlanjutan. Praktik yang tidak terukur berpotensi mengakibatkan degradasi tutupan hutan, degradasi biodiversitas, ketidakseimbangan ekosistem, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga eskalasi konflik sosial. Secara global, komoditas ini tetap menjadi subjek kontroversi karena korelasi antara lahan budidaya dengan kawasan hutan hujan tropis yang kaya karbon. Penerapan sistem monokultur untuk tujuan komersial seringkali dituding sebagai penyebab utama terusirnya flora dan fauna dari habitat aslinya (Meijaard et al., 2018).

Merespons tekanan kampanye negatif tersebut, Pemerintah Indonesia merancang standar keberlanjutan melalui instrumen Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bukti komitmen terhadap pelestarian sumber daya alam. Berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2020 dan Permentan No. 38 Tahun 2020, sertifikasi ISPO kini bersifat wajib bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pekebun swadaya, dengan batas akhir pemenuhan kewajiban pada

tahun 2025. Standar ini mencakup lima pilar utama, yaitu legalitas usaha, praktik agronomis yang baik, manajemen lingkungan dan biodiversitas, aspek transparansi, serta komitmen terhadap pengembangan usaha berkelanjutan.

Namun, upaya inklusivitas pekebun swadaya dalam rantai pasok tersertifikasi ini masih menghadapi berbagai kendala struktural di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada evaluasi realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO di tingkat pekebun rakyat, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul guna mendukung terciptanya konsep perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan pengambilan data di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2024 hingga April 2024. Alat meliputi kuesioner, alat tulis, laptop, clipboard, kamera (handphone). Bahan adalah lembar pertanyaan skala Guttman Sugiyono (2017) yang telah disusun berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO. Studi ini mengadopsi desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif guna menyajikan data secara sistematis dan akurat. Dalam proses pengumpulan data primer, identifikasi dan penentuan responden dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu petani kelapa sawit swadaya yang berdomisili dan memiliki kebun di wilayah penelitian. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 100 orang pekebun swadaya. Proses perolehan data primer dalam penelitian ini diselenggarakan melalui teknik komunikasi langsung dengan para subjek penelitian (kusioner). yang memuat indikator-indikator penerapan ISPO, seperti legalitas lahan, kelembagaan petani, pengelolaan lingkungan, praktik budidaya, serta pemantauan dan pelaporan operasional kebun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tabulasi frekuensi, perhitungan skor, dan persentase ketercapaian berdasarkan jawaban Ya/Tidak sesuai skala Guttman untuk menilai tingkat penerapan masing-masing prinsip ISPO. Hasil akhir disajikan dalam bentuk deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kondisi riil penerapan praktik perkebunan berkelanjutan oleh pekebun swadaya di Kecamatan Pelepat Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor usia memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja. (dalam hal ini petani) dimana umur berkaitan dengan kemampuan fisik dan pikiran yang berperan dalam pengembangan perkebunan. Untuk mengetahui karakteristik reponden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Komposisi Jumlah dan Persentase umur.

No	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-45	76	76%
2	46-60	20	20%
3	>60	4	4%
	Total	100	100

Dominasi petani pada usia 20–45 tahun menggambarkan bahwa sebagian besar pekebun sawit di Kecamatan Pelepat Ilir sedang berada pada usia produktif. Menurut Paly et al. (2016), kelompok usia produktif memiliki kemampuan kerja yang lebih tinggi, lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, dan lebih mudah menerima inovasi baru. Kondisi ini

sebenarnya menguntungkan dalam implementasi ISPO karena peluang adopsi praktik perkebunan berkelanjutan lebih besar.

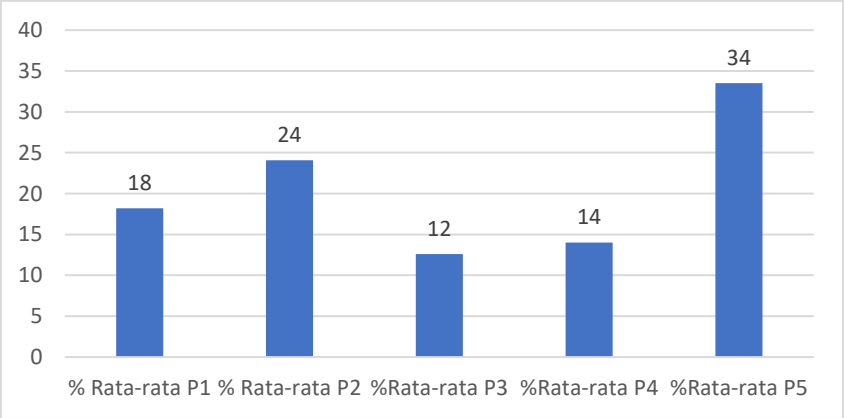
Sebaliknya, proporsi petani usia lanjut (>60 tahun) yang hanya 4% mengindikasikan bahwa mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam menerima perubahan teknologi, terutama terkait persyaratan administratif seperti legalitas, SPPL, maupun dokumentasi praktik budidaya.

Tabel 2. Menyajikan Tingkat Pendidikan Responden di Lokasi Penelitian.

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	30	30%
2	SMP	26	26%
3	SMA	23	23%
4	Diploma	1	1%
5	S-1	18	18%
6	S-2	2	2%
	Total	100	100

Pendidikan formal berperan penting dalam kemampuan petani memahami inovasi dan teknologi budidaya. Dominasi lulusan SD di Kecamatan Pelepat Ilir menunjukkan bahwa pemahaman petani terhadap persyaratan ISPO seperti STD-B, SPPL, pembukuan, atau SOP budidaya kemungkinan masih rendah. Kondisi ini menjelaskan mengapa pada beberapa prinsip ISPO seperti legalitas, dokumentasi kegiatan, dan pengelolaan lingkungan ketercapaiannya sangat minimal. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan petani lebih bergantung pada kebiasaan tradisional dan kurang memanfaatkan informasi dari pemerintah atau penyuluh pertanian.

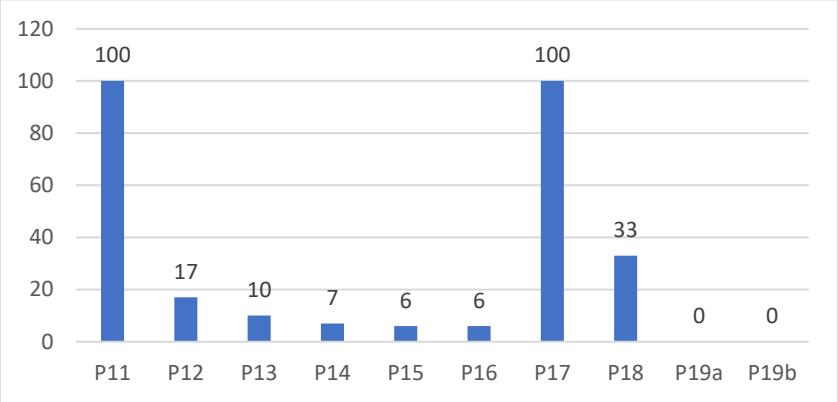
Realisasi Penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO



Gambar 1. Capaian Penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo Jambi.

Rendahnya capaian ISPO pada pekebun swadaya sejalan dengan temuan Hutabarat (2017) yang menjelaskan bahwa hambatan utama petani dalam memenuhi standar keberlanjutan adalah keterbatasan informasi, lemahnya pendampingan teknis, dan minimnya pemahaman terhadap aspek legalitas dan administrasi. Selain itu, belum adanya pendampingan intensif dari dinas terkait menyebabkan pekebun tidak paham terhadap kewajiban ISPO yang berlaku hingga 2025.

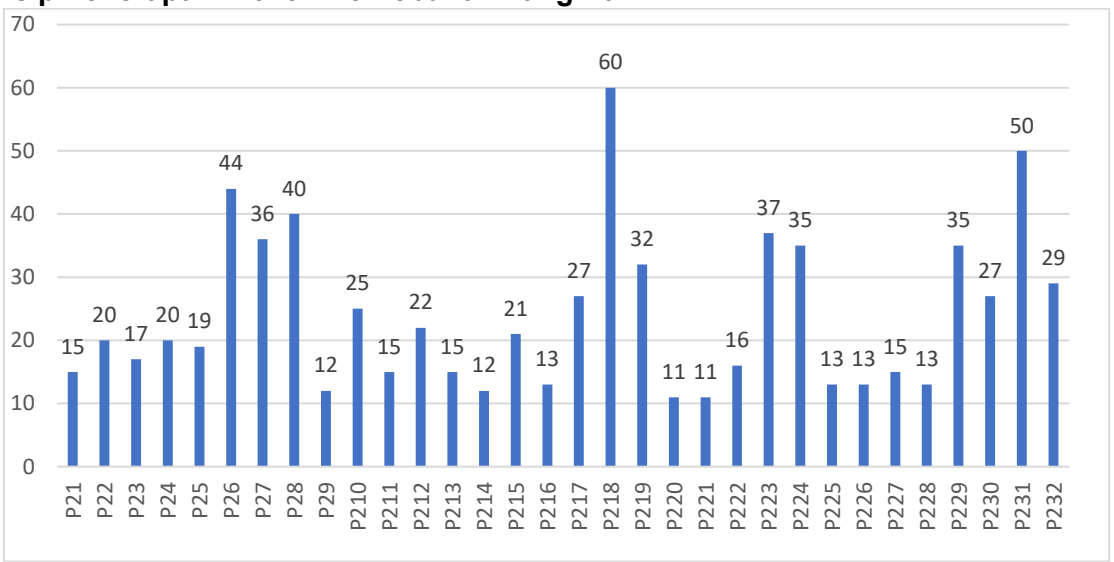
Prinsip kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan



Gambar 2. Capaian Penerapan Prinsip Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan.

Kepemilikan lahan cukup baik menunjukkan bahwa sebagian besar pekebun tidak menghadapi masalah status tanah. Namun, rendahnya kepemilikan STD-B menunjukkan minimnya pengetahuan pekebun tentang legalitas usaha perkebunan. Prosedur pengurusan legalitas usaha dianggap kompleks dan membebani petani karena keterbatasan biaya serta kurangnya sosialisasi. Banyak pekebun menganggap biaya pengurusan titik koordinat mahal, dan tidak memahami manfaat dokumen tersebut. Minimnya kelompok tani yang aktif menambah hambatan implementasi ISPO karena kelompok tani seharusnya menjadi sarana sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, dan koordinasi pengurusan legalitas. Pada aspek perizinan lingkungan, tidak terpenuhinya SPPL menunjukkan lemahnya kesadaran petani terhadap dampak lingkungan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pendampingan. Ketiadaan SPPL juga menjadi hambatan utama pekebun dalam pemenuhan sertifikasi ISPO. (Nurjanah *et al*., 2024).

Prinsip Penerapan Praktik Perkebunan Yang Baik

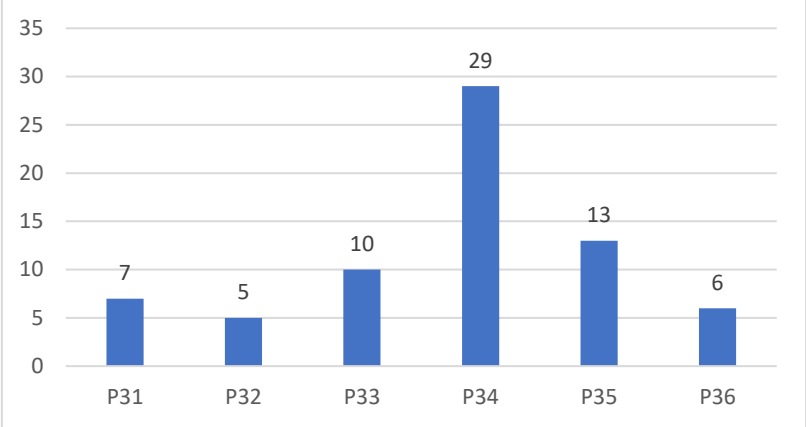


Gambar 3. Capaian Penerapan Prinsip dan Kriteria Praktik Perkebunan Yang Baik.

Rendahnya capaian praktik budidaya disebabkan oleh beberapa faktor (Hayata *et al*., 2020) Keterbatasan pengetahuan: Petani tidak memahami manfaat LCC, SOP, maupun standar jarak tanam, Keterbatasan ekonomi: Petani kesulitan membeli pupuk, bibit bersertifikat, dan tanaman penutup tanah, Tidak adanya kelompok tani aktif yang dapat menjadi wadah pembelajaran, Akses jalan buruk, sehingga petani sulit mengangkut sarana produksi dan panen, Penggunaan bibit tidak bersertifikat berpotensi menurunkan produksi jangka panjang bahwa petani swadaya umumnya tidak memiliki panduan teknis budidaya

yang baku sehingga praktik perkebunan tidak seragam. Penelitian Pinem & Pratiwi (2020) menegaskan bahwa bibit unggul bersertifikat berpengaruh besar terhadap produktivitas, Pada bagian panen, kebiasaan memanen buah belum matang menyebabkan rendahnya mutu TBS dan harga jual. Krisdiarto et al. (2017) yang menekankan bahwa ketepatan waktu panen merupakan faktor utama dalam menjaga kualitas minyak yang dihasilkan.

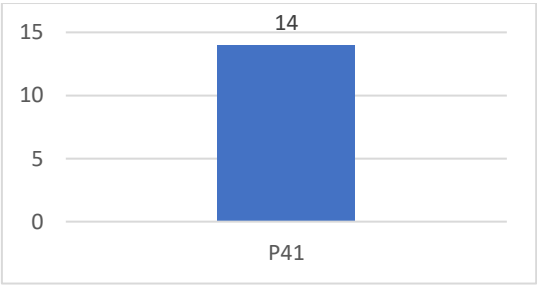
Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati



Gambar 4. Capaian Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati.

Dapat dilihat hal ini menunjukkan bahwa kesadaran petani terhadap aspek lingkungan sangat rendah. Minimnya sarana pencegahan kebakaran juga terjadi pada banyak perkebunan rakyat lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Mujayana *et al*. (2020) bahwa rendahnya kesiapsiagaan petani terhadap kebakaran lahan merupakan konsekuensi dari rendahnya pengetahuan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Padahal, isu lingkungan menjadi alasan utama ISPO diwajibkan oleh pemerintah. Azizah (2020) bahwa pekebun swadaya memiliki tingkat kesadaran lingkungan rendah dan sangat bergantung pada kebiasaan tradisional tanpa memperhatikan dampak ekologis.

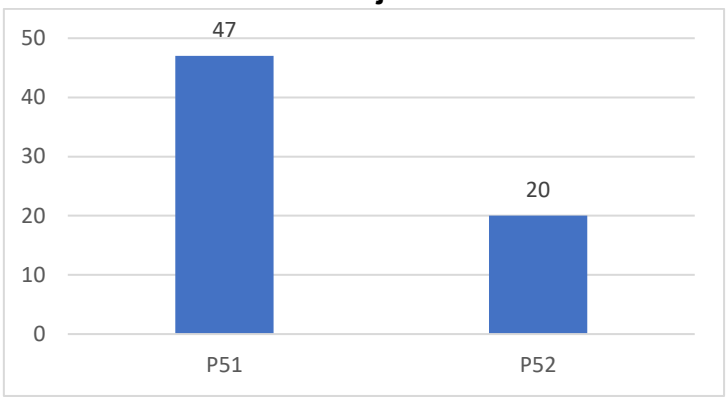
Prinsip Penerapan Transparansi



Gambar 5. Capaian Prinsip Penerapan Transparansi.

Ketergantungan pada tengkulak membuat harga tidak transparan. Ketiadaan kelompok tani menyebabkan petani tidak pernah mendapat informasi harga dari dinas atau pabrik. Ini memperkuat teori Tampubolon (2021) bahwa transparansi harga sulit tercapai tanpa kelembagaan petani yang kuat.

Prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan



Gambar 6. Capaian Penerapan Prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Petani umumnya berfokus pada produksi jangka pendek tanpa strategi keberlanjutan. Ketersediaan modal rendah dan tidak ada pendampingan dari dinas membuat petani tidak memahami konsep continuous improvement yang diwajibkan ISPO. Mayoritas petani bahkan belum mengetahui apa itu ISPO, sehingga prinsip ini menjadi yang paling sulit dipenuhi.

KESIMPULAN

Sintesis dari temuan lapangan dan hasil olah data dalam penelitian ini menghasilkan beberapa konklusi penting yang dipaparkan di bawah ini:

1. Secara umum, pencapaian standar ISPO di Kecamatan Pelepat Ilir belum memenuhi ekspektasi serta indikator target yang telah ditentukan. Defisit pencapaian ini terutama terlihat pada aspek legalitas kelembagaan serta tata kelola manajerial yang dipraktikkan oleh para pekebun swadaya.
2. Terdapat hambatan signifikan dalam pemenuhan kewajiban administratif terkait perizinan lingkungan. Selain itu, prosedur teknis dalam budidaya tanaman dan mekanisme logistik pengangkutan TBS belum sepenuhnya mengadopsi standarisasi yang diamanatkan.
3. Prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkebunan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga kriteria transparansi dalam kerangka ISPO belum dapat terpenuhi secara maksimal di tingkat lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Syaiful Hadi, N. D. (2020). Analisis Penerapan ISPO Pada Perkebunan Swadaya di Kota Dumai . Jurnal Agribisnis, Vol: 22.

Hutabarat, S. (2017). Rakyat Di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global*. Pekanbaru Indonesia, 43, 47–64.

Hayata, H., Nursanti, I., & Kriswibowo, P. (2020). Pengaruh Jarak Tanam Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq). Jurnal Media Pertanian, 5(1), 22. https://doi.org/10.33087/jagro.v5i1.92

Krisdiarto, A. W., Sutiarso, L., & Widodo, K. H. (2017). Optimasi Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Proses Panen-Angkut Menggunakan Model Dinamis Optimization of Oil Palm Fresh Fruit Bunch Quality in Harvesting-Transportation Process Using A Dynamic Model. Jurnal Neliti, 37(1), 101–107.

Nurjanah, R., Wirianata, H., Wilisiani, F., & Pratama, J. M. (2024). Analisis Keberlanjutan Perkebunan Sawit Rakyat dalam Mendukung Indonesian Sustainable Palm Oil di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin . Jurnal Agro Industri Perkebunan, 12(3), 179–194.

Meijaard, E. et al. (eds). (2018). Oil palm and biodiversity: A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force. (Switzerland: IUCN) p. 21

Paly, M. B., Kasus, S., Otting, D., & Bone, K. A. B. (2016). 80 | Analisis Faktor-Faktor. 3(January 2015), 79–101.

Pinem, L. J., & Pratiwi, M. (2020). Faktor-Faktor Pendorong Petani Dalam Memilih Benih Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Bersertifikat Dan Nonsertifikat. Agrimor, 5(1), 1–4. https://doi.org/10.32938/ag.v5i1.853 https: //journa l.unilak.a c.id/inde x.php/agr /article/vi ew/3475/2264

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Tampubolon, J., Ginting, A., & Nainggolan, H. L. (2021). Lembaga Petani Kelapa Sawit Sebagai Wadah Pengembangan Dan Modernisasi Sawit Rakyat Di Desa Kuta Jurung Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Pengabdian Kepada Masyarakat 01(02), 136–146. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/